

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Perangkat Daerah : **Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat**
2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	
			Formulasi Pengukuran	
1.	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Formulasi Pengukuran	: 1. $(\text{Jumlah Ranperda yang Ditetapkan Menjadi Perda} / \text{Jumlah Total Ranperda yang Diajukan}) \times 100\%$. Indikator ini mengukur efektivitas proses legislasi di tingkat daerah dengan menghitung seberapa besar proporsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berhasil diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
			Sumber Data	: Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan daerah (Perda), seperti Biro Hukum Setda Provinsi, Badan Legislasi/Bapemperda, OPD Terkait.
		2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Formulasi Pengukuran	: 2. $(\text{Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu} / \text{Jumlah Total Ranperda APBD yang disahkan}) \times 100\%$ Indikator ini mengukur keberhasilan proses penyusunan APBD yang dapat dinilai berdasarkan penyelesaian Penetapan Perda APBD Tepat Waktu Sesuai Jadwal Yang Ditentukan, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikator utamanya adalah apakah Perda APBD disahkan sebelum awal tahun anggaran (1 Januari) atau tidak dan (sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Desember tahun N-1). Indikator ini mengevaluasi kualitas penyusunan dan penetapan Perda APBD agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			Sumber Data	: Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD itu sendiri dan jadwal pembahasan dan penetapan APBD yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Formulasi Pengukuran	:	3. (Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Terlaksana / Total Kegiatan Pengawasan yang Direncanakan) x 100%
					Indikator ini mengukur persentase pencapaian kegiatan pengawasan dibandingkan total kegiatan pengawasan yang direncanakan.
			Sumber Data	:	Dari dokumen internal lembaga pengawas seperti laporan hasil kegiatan, hasil analisis, dan laporan penyerapan pandangan, serta Data Internal Sekretariat DPRD

Mataram, 2025
 SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

Hendra Saputra S.STP., M.H
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 19810130 199912 1001